

Setelah Berstatus BLU, Lalu Bagaimana?

Sejak akhir Maret yang lalu, usulan agar UIN Malang diberi status BLU telah dikabulkan oleh Menteri Keuangan. Surat Keputusan Menteri Keuangan telah menetapkan bahwa UIN Malang telah berstatus BLU penuh. Disebut sebagai BLU penuh, karena ada lembaga pemerintah setelah dievaluasi ternyata hanya mendapatkan status BLU bertahap. UIN Malang dengan berbagai pertimbangan dari hasil kajian yang mendalam akhirnya ditetapkan sebagai BLU penuh. Status sebagai BLU bagi UIN Malang ini akan selalu dievaluasi, dan jika suatu saat nanti ternyata tidak menunjukkan hasil yang memadai, status itu akan ditinjau, dan bisa jadi diturunkan atau bahkan dicabut kembali.

Ada tiga kata kunci yang harus mendapatkan perhatian dari status BLU ini. Pertama, dengan status BLU instansi pemerintah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, khususnya keuangan yang diperoleh dari sumbangan masyarakat, seperti uang pendaftaran mahasiswa baru, SPP, praktikum dan dana lainnya. Sebelum berstatus BLU seluruh penerimaan dana dari masyarakat harus disetor ke kas negara. Pengambilannya harus melalui prosedur sebagaimana pengelolaan uang negara pada umumnya. Semua penggunaan dana harus sesuai dengan persetujuan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Departemen Keuangan. Prosedur seperti ini, tidak jarang sulit dijalankan di lapangan. Suatu misal, mahasiswa sudah dipungut biaya praktikum, akan tetapi ternyata dalam mata anggaran tahun berjalan tidak ada belanja praktikum. Sementara mahasiswa harus menjalankan praktikum, dan dengan begitu harus disediakan pendanaannya. Setelah berstatus BLU, maka kesiulitan seperti ini tidak akan ditemui lagi. Sedangkan anggaran yang berasal dari pemerintah, berupa APBN sekalipun berstatus BLU, pengelolaannya masih mengikuti aturan yang berlaku sebagaimana sebelumnya.

Kedua, dengan fleksibilitas penggunaan keuangan itu diharapkan instansi pemerintah yang berstatus BLU, termasuk UIN Malang, harus berhasil meningkatkan kualitasnya. Kualitas pendidikan yang dimaksudkan diukur dari berbagai aspeknya. Jika menurut standar UU Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas 8 aspek dan sedangkan menurut Standar Akreditasi Institusi ada 15 standar yang meliputi : standar kepemimpinan, kemahasiswaan, SDM, kurikulum, prasarana dan sarana, pendanaan, tata pamong, sistem pengelolaan, sistem pembelajaran, sistem akademik, sistem informasi, sistem jaminan mutu, lulusan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan program studi. Termasuk bagian dari fleksibilitas tersebut, instansi pemerintah yang berstatus BLU diberi peluang untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang seharusnya selalu dijalankan.

Ketiga, dengan statusnya sebagai BLU, UIN Malang diberi keleluasaan untuk mengembangkan program bisnis guna mendapatkan tambahan pendanaan, dengan catatan tidak menambah beban mahasiswa, misalnya, dengan menaikkan besarnya SPP. Pemberian kewenangan itu diberikan tidak tanpa batas. Semua kebijakan harus dirancang terlebih dahulu, dan rancangan itu harus disetujui oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi dari Menteri Agama. Selain itu, untuk menjaga disiplin anggaran juga harus dibentuk unit khusus yang diberi nama Unit Audit Internal. Selain itu, juga harus dibentuk Pejabat Pengawas Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Pejabat Pengawas ini diangkat dari unsur perseorangan intern dan eksternal kampus yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Satu hal yang menggembirakan bahwa dengan status sebagai BLU, maka UIN Malang diberikan peluang

untuk menambah kesejahteraan pegawai, dengan catatan dana penambahan kesejahteraan itu diperoleh dari usaha-usaha bisnis yang dikembangkan dan bukan dana yang bersumber dari APBN.

Beberapa Perubahan yang Seharusnya Dilakukan

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka setelah status BLU ada banyak hal yang harus diubah se cara menyeluruh oleh semua warga kampus ini. Perubahan berbagai aspek itu dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan latar belakang diberikannya status BLU itu, yaitu agar terjadi peningkatan kualitas hasil pendidikan melalui usaha-usaha bisnis dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, berikut dikemukakan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita semua. Beberapa hal yang dimaksudkan itu adalah sbb. :

Pertama, harus ada perubahan mental bagi seluruh warga kampus. Mental sebagai birokrat dan atau pegawai negeri harus diubah menjadi mental intrepeneur. Sebagai pegawai negeri biasanya bekerja terstandar dan juga seringkali tidak dipenuhi secara maksimal. Mental itu barangkali terbentuk karena gaji yang selalu diterima tidak ada korelasinya dengan prestasi yang diberikan. Bagi PNS yang rajin dan PNS yang malas imbalannya selalu sama. Selain itu karena tidak pernah ada resiko yang mengancam, maka kemudian tugas-tugas mereka ditunaikan sekedarnya. Mental seperti ini harus diubah menjadi mental wirausahawan atau intrepeneurship. Dalam hal institusi ini diberi kewenangan mengatur pengelolaan keuangan, maka dianggap syah institusi ini memberikan pihak-pihak tertentu penghargaan lebih ---gaji, bagi mereka yang berprestasi dari mereka yang bekerja ala kadarnya. Perubahan lainnya yang mungkin terjadi, jika dahulu, orang saling mengelompok atas dasar kesamaan faham, aliran atau organisasi, maka ke depan dengan orientasi seperti itu, pengelompokan----- jika masih ada, akan berubah menjadi berdasarkan keahlian dan profesionalisme. Ukuran-ukuran yang dikembangkan adalah didasarkan pada kualitas dan mutu, dan bukan lagi atas dasar primordialisme. Apa saja yang tidak berkualitas akan tidak laku, karena itu bagi orang yang tidak memiliki kelebihan atau kualitas akan beresiko ditinggalkan orang.

Ke dua, seluruh pimpinan pada berbagai tingkatannya ---Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala Biro, Kepala Bagian hingga unit yang terbawah, harus memiliki jiwa intrepeneur. Sebagai orang yang menyandang jiwa kewirausahaan tatkala mengambil kebijakan bukan saja berorientasi untuk menghabiskan anggaran, melainkan harus diorientasikan pada manfaat yang dihasilka dari anggaran itu. Jika sebelumnya pejabat dituntut selalu berpikir bagaimana anggaran bisa habis pada waktunya, agar anggaran tidak hangus, maka setelah BLU yang dipikirkan adalah bagaimana anggaran menjadi tersisa di akhir tahun untuk penambahan modal pada tahun berikutnya. Setelah berstatus BLU, dana yang diperoleh dari masyarakat tidak mengenal istilah hangus, karena itu tidak ada tuntutan untuk menghabiskan. Dan justru yang dituntut adalah agar setiap saat institusi ini berhasil menambah saving dana. Tegasnya pemimpin institusi yang berstatus BLU harus memiliki jiwa intrepeneurship dan bukan sebatas jiwa birokrat atau pegawai negeri semata.

Ke tiga, Sebagai pemimpin yang memiliki jiwa intrepeneur, maka mereka harus mampu merintis dan

mengembangkan berbagai kemungkinan berbisnis. Mereka harus memiliki imajinasi-imajinasi untuk membesarkan lembaganya, mengetahui jalannya dan sekaligus hambatan yang akan terjadi serta cara mengatasinya. Mereka harus mampu membangun teamwork yang kukuh, memiliki kemampuan melihat potensi setiap bawahannya dan mengembangkannya secara maksimal. Pemimpin BLU harus berani menghadapi masa depan yang tidak pasti serta resiko yang harus ditanggung. Selain itu mereka harus mampu mengikutkan semua, agar tidak muncul pihak-pihak yang kontra produktif atas kemajuan lembaganya. Tentu masih banyak lagi tuntutan lainnya yang harus dimiliki sebagai seorang intrepeneurship terkait dengan status BLU ini.

Ke empat, berani mengubah cara pengambilan keputusan terhadap tenaga kerja yang kurang produktif. Seringkali pimpinan harus toleransi terhadap beberapa staf, baik dosen maupun karyawan sekalipun mereka tidak mampu menunaikan tugasnya secara maksimal. Atas dasar alasan kohesivitas lingkungan kerja, persaudaraan, kebersamaan dan sejenisnya beberapa staf yang kurang produktif dibiarkan dan ditunggu hingga mengalami perubahan sikap dengan sendirinya. Kebijakan seperti itu, disadari atau tidak, mengganggu kesehatan institusi, karena tidak menghasilkan layanan yang terbaik. Status BLU tidak akan berjalan jika cara kerja seperti itu tetap dipertahankan. BLU selalu menuntut logika bisnis, sehingga siapapun yang kerjanya lambat dan tidak produktif, konsekuensinya akan ditinggal. Mungkin kalau menggunakan pendekatan seorang dokter dalam melakukan penyembuhan, suatu saat akan dilakukan amputasi. Jika memang penyakit yang ada di kaki tidak bisa disembuhkan, maka kaki yang berpenyakit harus dipotong untuk menyelamatkan bagian lainnya yang masih bisa diselamatkan.

Ke lima, orientasi kerja seadanya diubah menjadi bekerja secara maksimal. Sebagai seorang intrepeneur seharusnya bekerja tidak sebatas pada jam kerja yang ditentukan. Memang, lembaga ini tetap perlu memiliki aturan jam kerja. Akan tetapi, lebih-lebih para pemimpinnya, harus bersedia bekerja sesuai dengan tuntutan volume pekerjaan yang harus ditunaikan. Suatu misal, jika biasanya jam 14.00 harus pulang, karena kantor harus ditutup, maka dengan BLU bekerja bukan sebatas berapa lama harus di kantor, melainkan harus berorientasi pada selesainya pekerjaan ditunaikan. Bisa jadi pimpinan Fakultas pulang sampai larut malam, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Jika selama ini, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan telah bekerja sampai larut malam, maka artinya mereka telah menunaikan tugasnya sebagaimana yang dituntut oleh BLU.

Ke enam, sekalipun di tingkat universitas telah dibentuk Holding Company untuk mengembangkan bisnis yang berfungsi sebagai sumber dana, Fakultas semestinya juga harus berhasil membaca peluang-peluang bisnis dan memanfaatkannya untuk membesarkan lembaganya. Contoh konkrit misalnya, saat ini banyak dibutuhkan layanan penataran, seminar, pelatihan-pelatihan oleh para guru untuk memenuhi kebutuhan persyaratan sertifikasi. Selain itu, munculnya isu untuk membangun pendidikan bermutu, pendidikan terpadu, pendidikan usia dini dan terakhir pendidikan internasional memerlukan konsep-konsep implementasinya. Munculnya inovasi pendidikan seperti itu, maka Fakultas Tarbiyah ditunggu perannya. Informasi yang menggembirakan akhir-akhir ini, bahwa beberapa kali UIN Malang kedatangan para pejabat dari berbagai daerah (Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Jaya Pura) untuk mendapatkan bantuan layanan, baik terkait dengan perumusan konsep maupun penyediaan ketenagaannya. Fakultas Tarbiyah dalam hal ini perlu membentuk pusat-pusat kajian, misalnya Pusat Kajian Manajemen dan

Kepemimpinan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam dan lain-lain, yang secara langsung lembaga tersebut dapat melayani kebutuhan itu. Selain itu, juga perlu merintis bidang-bidang kehumasan yang bertugas mengembangkan jaringan kerjasama dan bahkan juga marketing yang handal.

Suasana Kampus dengan Status BLU

Jika BLU dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, maka sesungguhnya kampus ini akan menuju ke arah suasana yang lebih logik dan rasional. Kebiasaan lama yang lebih berorientasi menunggu petunjuk, pedoman, juklak dan juknis harus segera ditinggalkan. Kemudian setelah perubahan itu akan terbangun warga kampus yang semakin kreatif, kaya ide dan semuanya memiliki pandangan ke arah pada pencapaian cita-cita yang lebih maju, segar dan menggembirakan. BLU ini memberi peluang kepada siapa saja yang berprestasi akan mendapat imbalan lebih, sedangkan yang tidak berprestasi akan semakin tertinggal. Selain itu BLU menuntut adanya keterbukaan dan semua jenis tugas dikerjakan dengan pendekatan substansi dan bukan sebatas pendekatan formalitas. Jika sebelum BLU, pekerjaan ditunaikan dengan pendekatan proyek, maka setelah BLU pendekatan seperti itu, tidak relevan lagi. Cara berpikir dengan orientasi menghabiskan uang berubah menjadi berpikir untuk mendapatkan uang demi kebesaran lembaga.

Dengan status BLU ini diharapkan semua saja, baik dosen, karyawan dan mahasiswa dalam menunaikan perannya selalu berorientasi pada kualitas. Merena seharusnya selalu paham logika pasar yaitu selalu terjadi kompetisi. Pasar selalu menuntut dan memilih produk yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan. Customer akan tetap membeli produk jika produk itu memiliki kualitas terbaik, mudah didapat dan mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik pula. Jika kita cermat melihat kehidupan ini, sesungguhnya tanpa BLU pun tuntutan nyata masyarakat seperti itu, selalu semakin rasional dan maju. Jika kita tidak mengikuti orientasi itu, suka atau tidak suka, lembaga kita akan ditinggal simpatisan atau customer kita. Oleh karena itu, agar kampus kita, UIN Malang ini tetap berada di depan dalam gerak dinamika perkembangan perguruan tinggi, tidak ada pilihan lain kecuali tuntutan kualitas harus kita penuhi bersama.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari kualitas adalah performance dari seluruh warga kampus. Performence itu tampak pada seluruh aktivitas warga kampus, baik dalam penunaian tugas yang semakin profesional, hubungan-hubungan antar individu yang seharusnya selalu menampakkan ke-Islaman,---ramah, kasih sayang antar sesama, amanah, fathonah, damai, sabar, ikhlas, banyak bersyukur dan istiqomah, maupun lainnya yang lebih luas.. Keindahan hati dalam berinteraksi antara sesama ini, juga akan lebih sempurna manakala, wajah kampus ini juga dihiasi dengan banyaknya bacaan al Qur'an pada setiap waktu, serta sesegera mungkin seluruh warga kampus meninggalkan tugasnya menuju ke masjid takala adzan dikumandangkan untuk menunaikan sholat wajib secara berjama'ah. Inilah Kampus yang ingin dibangun, yaitu berpenampilan gagah, indah, aman dan bersih, dihuni oleh orang-orang yang menyandang kedalaman spiritual, agung akhlaknya, luas ilmunya dan matang profesionalnya.